

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah isu yang sangat rumit dan melibatkan banyak dimensi, yang berhubungan dengan berbagai aspek sosial, budaya, dan lainnya. Isu kemiskinan menjadi fenomena yang signifikan, terutama di Indonesia (Astuti & Lestari, 2018). Secara keseluruhan, antara bulan September 2012 hingga Maret 2023, angka kemiskinan di Indonesia menunjukkan penurunan, baik dalam hal jumlah maupun persentase, kecuali pada bulan September 2013, Maret 2015, Maret 2020, September 2020, dan September 2022 (BPS, 2023a).

Masalah kemiskinan bukan sekadar isu di tingkat nasional, tetapi juga menjangkau setiap daerah di seluruh Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, dari 34 Provinsi terdapat 16 Provinsi dengan angka kemiskinan diatas angka nasional. Lima provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi terletak di kawasan timur Indonesia. Provinsi tersebut meliputi Papua dengan tingkat kemiskinan mencapai 26,03 persen, diikuti oleh Papua Barat dengan 20,49 persen, Nusa Tenggara Timur sebesar 19,96 persen, Maluku dengan 16,42 persen, dan Gorontalo dengan 15,15 persen. Sementara itu, untuk Pulau Jawa, provinsi yang memiliki angka kemiskinan di atas rata-rata nasional adalah Jawa Timur, yang menempati urutan ke-16 dengan tingkat kemiskinan sebesar 10,35 persen. Selanjutnya, Jawa Tengah berada di

peringkat ke-15 dengan angka kemiskinan 10,77 persen, sementara D. I. Yogyakarta memperoleh angka kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa, berada di posisi ke-14 dengan 11,04 persen.

Meskipun Daerah Istimewa Yogyakarta telah meraih banyak pencapaian, tantangan kemiskinan masih membuat pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta belum mencapai standar yang lebih baik dibandingkan dengan nasional (Astuti & Lestari, 2018). Selain itu, Provinsi D. I. Yogyakarta dikenal luas sebagai pusat pendidikan dan pariwisata. Namun, kenyataannya, provinsi ini justru mencatatkan angka kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa (Putra & Suharto, 2024).

Tabel 1 Tingkat Kemiskinan di Provinsi DIY

Tahun	Persentase (%)
2019	11,70
2020	12,28
2021	12,80
2022	11,34
2023	11,04

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DIY

Berdasarkan data pada tabel 1, Tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2019, angka kemiskinan mengalami penurunan menjadi 11,70%. Namun, situasi berubah pada tahun 2020, ketika tingkat kemiskinan kembali meningkat menjadi 12,28%. Kenaikan ini berlanjut pada tahun 2021, dengan angka mencapai 12,80%. Kondisi ini dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di DIY mengalami penurunan yang signifikan (Firdaus, 2021). Pada tahun

2023, tingkat kemiskinan berhasil turun menjadi 11,04%. Meskipun mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir, upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta belum sepenuhnya membuahkan hasil yang diharapkan. Penurunan angka kemiskinan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, serta upah minimum provinsi.

Karakteristik penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta juga ditandai dengan rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar penduduk. Sebagian besar penduduk dengan pendapatan per kapita rendah, dan keterbatasan lapangan kerja di sektor formal. Dampaknya adalah pilihan lapangan kerja yang dapat diakses warga menjadi terbatas dan cenderung bergeser ke sektor informal seperti pedagang kaki lima dan musiman (Saragih, 2015).

Salah satu cara mengatasi kemiskinan adalah dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi, yang diukur dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), merupakan salah satu indikator utama untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dari perspektif ekonominya. Pertumbuhan ekonomi ini memiliki peran yang krusial dalam menurunkan tingkat kemiskinan di setiap wilayah. Ketika suatu daerah mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif, hal ini seringkali beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang pada

gilirannya berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan (Ardian et al., 2021).

Tabel 2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DIY

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2019	6,60
2020	-2,67
2021	5,58
2022	5,15
2023	5,07

Sumber : Bappeda.Jogjapro.go.id

Penurunan tingkat kemiskinan di suatu wilayah menunjukkan bahwa upaya pembangunan yang dilakukan telah berhasil. Untuk mencapai hal ini, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang disertai dengan kemajuan di berbagai sektor usaha. Keberhasilan dalam kedua aspek tersebut sangat penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan (Saman Fajriansyah, 2022). Dapat dilihat pada tabel 2 bahwa pada tahun 2019 Pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan hingga 6,60% dan mengalami penurunan hingga menyentuh -2,67% pada tahun 2020. Secara sektoral, kontraksi ini terutama dipicu oleh sektor transportasi serta penyediaan akomodasi dan layanan makan-minum. Di sisi pengeluaran, semua komponen juga mengalami penurunan, termasuk pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto (BPS, 2021).

Selain Pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan, tidak terlepas juga peran dari pengaruh Indeks Pembangunan Manusia. Menurut (Ningrum et al., 2020) Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam meningkatkan kualitas manusia. Namun, kemiskinan diduga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan disparitas dalam peningkatan IPM. Hal ini disebabkan oleh kemampuan terbatas yang dihadapi oleh individu yang hidup dalam kemiskinan untuk mengakses pendidikan yang layak serta pelayanan kesehatan yang memadai. Akibatnya, hal ini tidak hanya menghambat pengembangan sumber daya manusia, tetapi juga dapat menyebabkan peningkatan angka pengangguran.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 72,91 persen. Pada tahun 2023 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 73,55 mengalami kenaikan sebesar 0,64 persen dari tahun sebelumnya.

Tabel 3 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DIY

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (%)
2019	79,99
2020	79,97
2021	80,22
2022	80,64
2023	81,09

Sumber : BPS Provinsi DIY

Berdasarkan data pada tabel 3 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi DI Yogyakarta menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2019-2020 IPM mengalami penurunan dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 yaitu 80,22% dan terus meningkat pada tahun 2023 mencapai

81,09%. Menurut (Edna Safitri et al., 2022), Pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat akan menghasilkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang baik dan berkualitas tinggi, yang dapat diukur dari kualitas sumber daya manusia. Di sisi lain, produktivitas yang rendah dapat menyebabkan tingginya angka kemiskinan. Hal ini merupakan salah satu dampak yang diakibatkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan.

Komponen lain yang mempengaruhi tingkat kemiskinan selain dari pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dapat dilihat dari Upah Minum Provinsi. Upah Minimum Provinsi (UMP) dijadikan sebagai ukuran kompensasi minimum yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja di suatu provinsi (Permana & Pasaribu, 2023). Semakin tinggi besaran upah yang ditetapkan oleh pemerintah, semakin berpotensi terjadi penurunan jumlah tenaga kerja. Di sisi lain, jika upah meningkat, hal ini dapat berdampak negatif bagi Perusahaan (Widiantari et al., 2024).

Tabel 4 Upah Minimum Provinsi DIY

Tahun	UMP (Rupiah/Bulan)
2019	1.570.923
2020	1.704.608
2021	1.765.000
2022	1.840.916
2023	1.981.782

Sumber : BPS Provinsi DIY

Pada tahun 2023, nilai rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia mencapai Rp 2.923.309,40. Penetapan UMP tahun ini

dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022, dengan rata-rata kenaikan sebesar 7,26%. Dapat dilihat pada tabel 4, bahwa besaran nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) terus mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun. Meskipun UMP terus mengalami kenaikan, namun hal ini belum dapat menurunkan angka kemiskinan di Provinsi DIY. Penentuan upah minimum bagi buruh menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Ketika nilai upah ditetapkan tinggi, jumlah penawaran tenaga kerja akan meningkat, tetapi di sisi lain, permintaan terhadap tenaga kerja akan mengalami penurunan (Wikhdatus Sa & Sardha Ardyan, 2016).

Berdasarkan penjelasan di atas serta berbagai permasalahan yang ada, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan **judul “PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM), DAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2023”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2023?

2. Bagaimana Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2023?
3. Bagaimana Pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2023?
4. Bagaimana Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) secara Bersamaan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2023?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2023.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2023.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2023.
4. Untuk mengetahui Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, dan UMP

secara Bersama- sama Terhadap Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010- 2023.

Manfaat Penelitian :

1. Bagi pemerintah

Dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pihak pemerintah atau para pengambil keputusan dalam menangani isu-isu yang mempengaruhi tingkat pengangguran.

2. Bagi masyarakat luas

Temuan dari penelitian ini memiliki nilai sebagai sumber pengetahuan dan informasi yang bermanfaat dalam meningkatkan wawasan.

3. Bagi peneliti berikutnya

Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini menjadi sumber informasi yang dapat dijadikan pijakan awal untuk menggali topik sejenis atau menjadi bahan rujukan penelitian dengan pendekatan yang lebih mendalam.

4. Bagi penulis

Berfungsi sebagai bahan untuk memperluas dan menerapkan kemampuan berpikir kritis, analitis dan sistematis penulis dalam pemecahan masalah yang ditemukan, yang diperoleh penulis selama perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Ponorogo